

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat ketentuan sistem pemidanaan bagi pelaku tindak pidana kejahatan jabatan judi online terhadap Pejabat Negara. Aturan yang mengatur mengenai perjudian diatur dalam Buku II, terutama dalam Pasal 426 dan 427, KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023). Serta Pasal 58, 59 KUHP yang mengatur mengenai factor pemberat pidana pada kejahatan jabatan apabila dilakukan dengan menjalankan profesi. Dalam konteks pemberatan, Pasal ini menjadi kerangka normatif bagi hakim untuk menilai kondisi-kondisi yang meningkatkan derajat kesalahan dan dampak tindak pidana secara proporsional.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pentingnya peningkatan hukuman terhadap pemberatan tindak pidana perjudian online dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Metode yang dipakai dalam penelitian ini meliputi Pendekatan Konsep dan Perbandingan Hukum.

Maka dari itu pemberatan pidana perlu diatur secara eksplisit guna mewujudkan keadilan, kepastian hukum, serta memberikan efek jera dan untuk pelaku yang memang benar melakukan recidive maka diperlukan bukti-bukti yang jelas, tidak hanya mengandalkan keterangan pelaku. Hal ini berkaitan dengan penambahan ancaman maksimum pidana sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang.

Kata Kunci: Pemberatan, tindak pidana, judi online, pejabat negara

ABSTRACT

This study aims to examine the provisions of the criminal justice system for perpetrators of official crimes involving online gambling against state officials. The rules governing gambling are stipulated in Book II, specifically Articles 426 and 427 of the New Criminal Code (Law No. 1 of 2023). Articles 58 and 59 of the Criminal Code also regulate aggravating factors for crimes committed in the course of professional activity. In the context of aggravating factors, these articles serve as a normative framework for judges to assess conditions that increase the degree of culpability and impact of the crime proportionally.

This study aims to evaluate the importance of increasing penalties for aggravating online gambling crimes within the Indonesian criminal law system. The methods used in this research include the Conceptual Approach and Comparative Law.

Therefore, aggravating penalties need to be explicitly regulated to achieve justice, legal certainty, and provide a deterrent effect. For perpetrators who actually commit recidivism, clear evidence is required, not simply relying on the perpetrator's testimony. This relates to increasing the maximum penalty as mandated by law.

Kata Kunci: Pemberatan, tindak pidana, judi online, pejabat negara